

PENGANTAR REDAKSI

Secara global, telah lahir *Millenium Development Goals (MDGs)* sebagai kesepakatan antarnegara untuk lebih mengarahkan tujuan pembangunan. Di dalamnya terdapat delapan prinsip dan 18 sasaran yang harus menjadi komitmen suatu negara. *Populasi* kembali hadir dengan empat artikel yang sekiranya relevan dengan sasaran MDGs pada tahun 2015, yakni kebijakan perencanaan tata ruang, prospek demokratisasi desa, privatisasi pelayanan kesehatan, dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Tulisan pertama membahas tentang kebijakan perencanaan tata ruang dan pemberdayaan potensi daerah. Perencanaan tata ruang dan potensi daerah, pada hakikatnya, ditujukan pada tindakan konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang, dalam hal ini adalah peruntukan lahan untuk masa datang. Hal ini dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh para perencana tata ruang, penentu kebijakan, dan masyarakat dalam memahami potensi daerah yang dimiliki.

Tulisan kedua menyajikan tentang kendala dan prospek demokratisasi desa pada era otonomi daerah. Demokratisasi desa dapat berjalan dengan baik apabila terdapat empat unsur yang saling dibutuhkan, seperti pemerintah sebagai fasilitator, adanya forum yang dapat mengakomodasi lintas kepentingan, berkembangnya inisiatif dan kreatifitas rakyat, serta adanya insentif bagi desa yang mampu mengelola kepentingan warganya secara mandiri. Tulisan ketiga membahas tentang privatisasi sistem pelayanan kesehatan dan implikasinya pada agenda penelitian dan kebijakan publik. Untuk mencapai sasaran MDGs, peran dan fungsi lembaga pelayanan kesehatan untuk mencapai sehat untuk semua pada 2015 menjadi penting. Oleh sebab itu, perlu adanya rumusan kebijakan pelayanan kesehatan yang memenuhi keseimbangan antara berbagai tuntutan yang lebih efektif dan efisien, serta berkeadilan sosial bagi yang kurang mampu.

Tulisan keempat sebagai bagian akhir dari edisi ini membahas tentang privatisasi penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dengan angkatan kerja yang relatif terdidik dan melimpah jumlahnya, rasanya aneh jika sebagian besar tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri justru yang berpendidikan rendah. Keterlibatan swasta dalam pengiriman TKI ini ternyata masih mempunyai banyak konsekuensi. Tampaknya kita perlu belajar dari Filipina yang telah sukses mengelola pengiriman tenaga kerja dengan bantuan pihak swasta.